

# LAPORAN KEUANGAN

PERIODE 31 DESEMBER 2022

An illustration of financial reports and charts. In the foreground, a large orange folder with a white label that says "financial reports" is shown. Behind it, several sheets of paper are visible, featuring various data visualizations: a donut chart with orange, green, and blue segments, a line graph with a yellow and green line, and a bar chart with black bars. The background consists of a red and teal geometric pattern.

**financial  
reports**

**UAPPA DIPA 005.01**

**PENGADILAN TATA USAHA  
NEGARA SAMARINDA**



**LAPORAN KEUANGAN**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022**

**BAGIAN ANGGARAN 005.01**

**BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jl. Bung Tomo, No. 136, Samarinda Seberang**

**Telp. 0541-260659 Fax. 0541-262062**

**Samarinda - Kalimantan Timur 75132**

**e-mail : [ptun.samarinda@gmail.com](mailto:ptun.samarinda@gmail.com)**

## KATA PENGANTAR

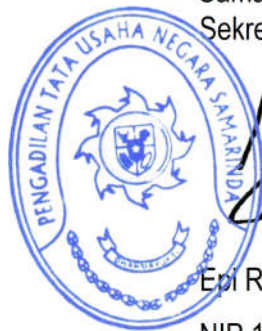
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.


Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Samarinda, Januari 2022  
Sekretaris,



  
Epi Randabunga Runggu, S.E.  
NIP 19790204 200502 2 001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	1
Ringkasan	2
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	21
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	28
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	43
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	49
F. Pengungkapan Penting Lainnya	52
VI. Lampiran dan Daftar	56



## Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jl. Bung Tomo, No. 136, Samarinda Seberang Samarinda - Kalimantan Timur 75132

Telp. 0541-260659 Fax. 0541-262062 e-mail : ptun.samarinda@gmail.com

---

### PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Samarinda, Januari 2022

Sekretaris,



Epi Randabunga Runggu, S.E.

NIP 19790204 200502 2 001

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp11.048.000,- dari estimasi pendapatan sebesar Rp9.134.000,- pada TA 2022.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2022 adalah sebesar Rp5.213.385.734,- atau mencapai 98 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp5.317.505.000,-.

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp24.643.087.290,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp2.564.450,- ; dan Aset Tetap (neto) sebesar Rp24.640.522.840,-;

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp18.682.119,- dan Rp24.624.405.171,-.

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp11.048.000,-, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp6.418.765.720,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(6.407.717.720,-). Defisit Kegiatan Non Operasional sebesar Rp(6.407.717.720,-) dan Tidak terdapat Defisit Pos-pos Luar Biasa sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(6.407.717.720,-).

### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar

Rp24.918.956.568,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(6.407.717.720,-) tidak terdapat terdapat Nilai Koreksi dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp6.113.166.323,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp24.624.405.171,-.

## **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### KANTOR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2022 DAN 2021

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	TA 2022		% thd Angg	TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	9.134.000	11.048.000	0,00	10.734.000
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>9.134.000</b>	<b>11.048.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.734.000</b>
<b>BELANJA</b>	<b>B.2.</b>				
Belanja Pegawai	B.3	4.351.799.000	4.239.138.031	97,41	3.632.534.005
Belanja Barang	B.4	1.789.094.000	1.728.042.680	96,59	1.315.951.729
Belanja Modal	B.5	60.000.000	59.233.612	98,72	264.900.000
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>6.200.893.000</b>	<b>6.026.414.323</b>	<b>97,19</b>	<b>5.213.385.734</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*



**KANTOR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA**  
**NERACA**  
**PER 31 Desember 2022 DAN 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	2.564.450	610.800
Jumlah Aset Lancar		2.564.450	610.800
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.14	16.798.993.000	16.798.993.000
Peralatan dan Mesin	C.15	4.066.423.831	3.938.834.851
Gedung dan Bangunan	C.16	7.919.067.632	7.889.623.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	192.064.950	192.064.950
Aset Tetap Lainnya	C.18	5.717.078	5.717.078
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(4.341.743.651)	(3.878.517.799)
Jumlah Aset Tetap		24.640.522.840	24.946.715.080
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tidak Berwujud	C.21	98.890.000	98.890.000
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(98.890.000)	(98.890.000)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>24.643.087.290</b>	<b>24.947.325.880</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	18.682.119	28.369.312
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		18.682.119	28.369.312
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>18.682.119</b>	<b>28.369.312</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.28	24.624.405.171	24.918.956.568
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>24.624.405.171</b>	<b>24.918.956.568</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>24.643.087.290</b>	<b>24.947.325.880</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

### III. LAPORAN OPERASIONAL

## KANTOR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	11.048.000	10.734.000
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>11.048.000</b>	<b>10.734.000</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	4.239.138.031	3.632.534.005
Beban Persediaan	D.3	53.288.250	54.037.745
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.101.119.683	906.299.276
Beban Pemeliharaan	D.5	489.971.015	348.417.671
Beban Perjalanan Dinas	D.6	72.022.889	14.072.680
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	463.225.852	449.572.712
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>6.418.765.720</b>	<b>5.404.934.089</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(6.407.717.720)</b>	<b>(5.394.200.089)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	D.11	-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(6.407.717.720)</b>	<b>(5.394.200.089)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
Pendapatan PNB	D.12	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(6.407.717.720)</b>	<b>(5.394.200.089)</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

## IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### KANTOR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2022 DAN 2021

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2022	2021
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	24.918.956.568	25.106.440.923
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(6.407.717.720)	(5.394.200.089)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	6.113.166.323	5.206.715.734
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.5	<b>24.624.405.171</b>	<b>24.918.956.568</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

*Dasar Hukum*  
*Entitas dan*  
*Rencana*  
*Strategis*

Tahun 2022 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung 2015 – 2022 dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tahun 2015 sampai dengan 2022 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”, yang bertujuan agar Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda TH 2015 – 2022 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara;
2. Peningkatan Tertib Administrasi Perkara;
3. Peningkatan Kualitas SDM;
4. Peningkatan Kualitas Pelaporan;
5. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice);

6. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI;
8. Program Peningkatan Manajemen Peadilan Militer dan TUN.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis Akuntansi*

## **A.3. Basis Akuntansi**

Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh

transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah

sebagai berikut:

*Pendapatan-  
LRA*

**(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-LO*

**(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja*

**(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## *Beban*

### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## *Aset*

### **(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

## *Aset Lancar*

### **a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.



- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

## *Aset Tetap*

### **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2021 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka

revaluasi dilakukan dengan pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2021 dan 2022. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai asset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai asset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai asset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

### *Penyusutan Aset Tetap*

#### **c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber

sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang Jangka Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

## Aset Lainnya

### e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

#### *Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

<b>Kelompok Aset Tak Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat (tahun)</b>
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

## *Kewajiban*

### **(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

#### a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

#### b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

## *Ekuitas*

### **(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah 6 kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Revisi yang terjadi adalah revisi perubahan halaman 3 DIPA dan belanja minus pegawai. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2022	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Jasa	9.134.000	9.134.000
Pendapatan Lain-lain	0	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>9.134.000</b>	<b>9.134.000</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	4.351.799.000	4.351.799.000
Belanja Barang	1.789.094.000	1.789.094.000
Belanja Modal	60.000.000	60.000.000
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>6.200.893.000</b>	<b>6.200.893.000</b>

*Realisasi Pendapatan  
Rp11.048.000,-*

### B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp11.048.000,- dan tidak terdapat estimasi pendapatan. Pendapatan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda terdiri dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan dan penerimaan kembali persekot/uang muka gaji dengan rincian sebagai berikut:

#### *Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan*

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	-	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	9.134.000	11.048.000	120,95
Penerimaan Kembali Belanja TAYL	-	-	-
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>9.134.000</b>	<b>11.048.000</b>	<b>120,95</b>

Realisasi Pendapatan Jasa TA 2022 mengalami peningkatan 22,39 persen dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan tarif

sewa rumah dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berdasarkan SK Nomor : W2.TUN5/178/KP.05.6/III/2022 tanggal 11 Maret 2021 dan adanya pengembalian Tunjangan Jabatan JSP an Rindana Puspa Ayu Hutabara S.H. pegawai yang bersangkutan menduduki jabatan baru sebagai Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksanan pada bulan November 2021.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2022 dan 2021*

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	0,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	11.048.000	10.734.000	2,93
Penerimaan Kembali Belanja TAYL	-	-	0,00
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>11.048.000</b>	<b>10.734.000</b>	<b>2,93</b>

## B.2 Belanja

*Realisasi Belanja  
Negara  
Rp6.026.414.323,-*

Realisasi Belanja instansi pada TA 2022 adalah sebesar Rp6.026.414.323,- atau 97 persen dari anggaran belanja sebesar Rp6.200.893.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022*

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	4.351.799.000	4.239.138.031	97,41
Belanja Barang	1.789.094.000	1.728.042.680	96,59
Belanja Modal	60.000.000	59.233.612	98,72
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>6.200.893.000</b>	<b>6.026.414.323</b>	<b>97,19</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>6.200.893.000</b>	<b>6.026.414.323</b>	<b>97,19</b>

Dibandingkan dengan TA 2021, Realisasi Belanja TA 2022 mengalami peningkatan sebesar 15,60 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Meningkatnya Belanja Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.



2. Meningkatnya Belanja Barang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

*Perbandingan Realisasi Belanja TA 2022 dan 2021*

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	4.239.138.031	3.632.534.005	16,70
Belanja Barang	1.728.042.680	1.315.951.729	31,32
Belanja Modal	59.233.612	264.900.000	(77,64)
<b>Jumlah</b>	<b>6.026.414.323</b>	<b>5.213.385.734</b>	<b>15,60</b>

*Belanja Pegawai  
Rp4.239.138.031,-*

**B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.239.138.031,- dan Rp3.632.534.005,-.

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja TA 2022 mengalami peningkatan sebesar (16,70) persen dari TA 2021. Hal ini disebabkan karena adanya Mutai Pegawai. Mutasi Pegawai Masuk lebih besar dibandingkan dengan mutasi pegawai keluar.

*Perbandingan Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021*

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.239.138.031	3.632.534.005	16,70
Belanja Lembur	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>4.239.138.031</b>	<b>3.632.534.005</b>	<b>16,70</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>4.239.138.031</b>	<b>3.632.534.005</b>	<b>16,70</b>

### Belanja Barang

Rp1.728.042.680,-

### B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.728.042.680,- dan Rp1.315.951.729,-. Realisasi Belanja Barang TA 2022 mengalami peningkatan 31,33 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2021. Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya Belanja Barang Operasional Perkantoran, kegiatan Pemeliharaan yang dilakukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan yang paling signifikan adalah peningkatan pada pos belanja Perjalanan Dalam Negeri.

#### Perbandingan Belanja Barang TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	919.589.571	748.049.576	22,93
Belanja Barang Non Operasional	990.000	1.835.000	-
Belanja Jasa	190.227.305	149.365.977	27,36
Belanja Pemeliharaan	489.971.015	348.417.671	40,63
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	72.022.889	14.072.680	411,79
Belanja Barang Persediaan	55.428.000	54.210.825	2,25
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>1.728.228.780</b>	<b>1.315.951.729</b>	<b>31,33</b>
Pengembalian Belanja	-	-	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.728.228.780</b>	<b>1.315.951.729</b>	<b>31,33</b>

### Belanja Modal

Rp59.233.612,-

### B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp59.233.612,- dan Rp264.900.000,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar (77,64) persen dibandingkan TA 2021 disebabkan oleh menurunnya jumlah Anggaran Belanja Modal yang dikelola PTUN Samarinda. Tetapi untuk hasil output telah mencapai 100 persen.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021*

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.233.612	264.900.000	(77,64)
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Penambahan Nilai Jaringan	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>59.233.612</b>	<b>264.900.000</b>	<b>-77,64</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>59.233.612</b>	<b>264.900.000</b>	<b>-77,64</b>

Tidak terdapat Belanja Modal Tanah

**B.5.1 Belanja Modal Tanah**

Tidak terdapat Belanja Modal Tanah pada kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp29.788.980,-

**B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 adalah sebesar Rp29.778.980,- sedangkan pada TA 2021 sebesar Rp264.900.000,- . Belanja Modal Peralatan dan mesin mengalami penurunan sebesar (77,64) persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 Hal ini disebabkan oleh Menurunnya Pagu Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2022. Namun untuk Hasil Output telah dilaksanakan secara Optimal.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dan TA 2021*

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Printer	9.900.000	0	0,00
Laptop	0	0	100,00
PC	0	114.900.000	
Lemari penyimpan disabilitas	3.441.000		
lemari kecil	1.443.000		
meja layanan disabilitas	2.109.000		
sofa ruang tunggu disabilitas	4.662.000		
tongkat tuna netra	1.296.480		
kursi roda	2.553.000		
ranjang pasien	4.384.500		
TV Led		18.190.000	
Speaker JBL 3 Series		25.600.000	
Sistem Rally Webcam		62.110.000	
Mikrophone		6.600.000	
Mixer Primatech		10.000.000	
Mesin Antrian Sidang		27.500.000	
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>29.788.980</b>	<b>264.900.000</b>	<b>-88,75</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>29.788.980</b>	<b>264.900.000</b>	<b>-88,75</b>

*Tidak terdapat Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin*

**B.5.3 Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin**

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin TA 2022 sedangkan pada TA 2021.

*Tidak terdapat Belanja Modal Gedung dan Bangunan*

**B.5.4 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 dan TA 2021.

*Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Rp29.444.632,-*

**B.5.5 Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan TA 2022 adalah Rp29.444.632,- dan tidak terdapat belanja modal Penambahan Nilai Gedung dan BangunanTA 2021.

*Tidak terdapat Belanja Modal Penambahan Nilai Jaringan*

**B.5.6 Belanja Modal Penambahan Nilai Jaringan**

Tidak terdapat Belanja Modal Penambahan Nilai Jaringan pada TA 2022 dan pada TA 2021.

*Tidak terdapat Belanja Bantuan Sosial*

**B.5.7 Belanja Bantuan Sosial**

Tidak terdapat Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 dan TA 2021.

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Tidak Terdapat Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran*

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Tidak terdapat Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Pada TA 2022 Bendahara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mengelola Uang Persediaan sebesar Rp50.000.000,- yang terbagi menjadi 2 yaitu UP Tunai sebesar Rp30.000.000,- dan UP Kartu Kredit Pemerintah sebesar Rp20.000.000,-. UP Tunai telah disetor ke Kas Negara pada tanggal 30 Desember 2022 dengan NTPN nomor C8CF35209N0067P1 sebesar Rp3.643.908,-.

Pada Bulan Desember TA 2022 Bendahara Pengeluaran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda meminta TUP sebesar Rp21.388.000,- yang digunakan untuk pembayaran uang makan bulan Desember 2022. Terdapat sisa TUP dan telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 30 Desember 2022 dengan NTPN Nomor C66E08JM919HQA6L sebesar Rp357.000,-.

*Tidak Terdapat Kas di  
Bendahara  
Penerimaan*

### C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Tidak terdapat Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Tidak Terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas*

### **C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas**

Tidak terdapat Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2022 dan pada 31 Desember TA 2021.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Tidak Terdapat Piutang PNBP*

### **C.4 Piutang PNBP**

Tidak terdapat Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

*Tidak Terdapat Bagian Lancar Tagihan TP/TGR*

### **C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Tidak terdapat Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Tidak Terdapat Bagian Lancar TPA*

### **C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Tidak terdapat Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Tidak Terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar*

### **C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar**

Tidak terdapat Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan

estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

### **C.8 Belanja Dibayar di Muka**

*Tidak terdapat Belanja  
Dibayar di Muka*

Tidak terdapat Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

*Tidak terdapat  
Pendapatan yang  
Masih Harus Diterima*

### **C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

Tidak terdapat Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Pendapatan yang Masih harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

*Persediaan  
Rp2.564.450,-*

### **C.10 Persediaan**

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp2.564.450,- dan Rp610.800,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2022 dan 2021

Jenis	TH 2022	TH 2021
Barang Konsumsi	2.564.450	610.800
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.564.450</b>	<b>610.800</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Dengan berita acara stok opname fisik persediaan nomor : W6-TUN3/1255/PL.07/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022.

*Tidak Terdapat  
Tagihan TP/TGR*

#### C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tidak terdapat Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Tidak Terdapat  
Tagihan Penjualan  
Angsuran*

#### C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Tidak terdapat Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

*Tidak terdapat Nilai  
Penyisihan Piutang  
Tak Tertagih – Piutang  
Jangka Panjang*

#### C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Tidak terdapat Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.



Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah

Rp16.798.993.000,-

#### C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp16.798.993.000,-.

Tidak terdapat Mutasi nilai tanah dari TA 2021 dan 2022:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021</b>	<b>16.798.993.000</b>
Mutasi tambah:	
Selisih Revaluasi Aset	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	-
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>16.798.993.000</b>

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Tanah TA 2022

No.	Luas (m <sup>2</sup> )	Lokasi	KIB	Nilai
1.	3000 m2	PTUN Samarinda, Jl. Bung Tomo No. 136	1	11.750.550.000
2.	700 m2	PTUN Samarinda, Jl. Bung Tomo No. 136	1	1.888.933.000
3.	400 m2	PTUN Samarinda, Jl. Bung Tomo No. 136	2	1.078.250.000
4.	800 m2	PTUN Samarinda, Jl. Bung Tomo No. 136	2	2.081.260.000
<b>Jumlah</b>				<b>16.798.993.000</b>

Keseluruhan tanah berada di Jl. Bung Tomo Samarinda Seberang kelurahan Baqa, dimana peruntukan tanah seluas 3000 m2 digunakan untuk gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, sedangkan yang lainnya digunakan untuk tempat tinggal atau rumah dinas. Tanah – tanah tersebut

telah bersertifikat atas nama PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MAHKAMAH AGUNG RI pada tanggal 29 Oktober 2014, sebelumnya keseluruhan sertifikat nama an Kementrian/Lembaga (Kementrian Kehakiman).

### C.15 Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan Mesin  
Rp4.066.423.831,-*

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp4.066.423.831,- dan Rp3.938.834.851,-.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021</b>	<b>2.918.560.851</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	24.000.000
<b>Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin</b>	<b>0</b>
Hibah Masuk	734.100.000
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>3.676.660.851</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	-2.745.381.993
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2020</b>	<b>931.278.858</b>

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- a. Pembelian Peralatan dan Mesin berupa Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, Sarana dan Prasarana Pendukung SIPP (Pengadaan PC Komputer) sebesar Rp24.000.000,- . Pengadaan Laptop ini melalui E Purchasing. Adapun beberapa dokumen pendukung pengadaan ini adalah:
  - SPK Nomor : W2-TUN5/241/PL.04/VI/2022 tanggal 18 Maret 2022;
  - Nomor ID Paket : PKM-P2003-2466178 tanggal 12 Maret 2022;
  - Nomor Kuitansi : 0169/2466178/SAP.KW/KALTIM/VI/2022;
  - BAST Nomor : W2-TUN5/367/PL.04/VI/2022 tanggal 03 Juni 2022;
  - BAP Nomor : W2-TUN5/368/PL.04/VI/2022 tanggal 03 Juni 2022;
  - SP2D Nomor 200461303006268 tanggal 11 Juni 2022.

- b. Hibah Masuk dari DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.H. Hakim PTUN Samarinda Berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp.15.000.000,-,. Peralatan dan Mesin berupa Meja PTSP sebagai partisipasi guna menunjang aktivitas pekerjaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berdasarkan:
- Perjanjian Hibah Nomor : W2-TUN5/478/PL.03/VI/2022 tanggal 26 Juni 2022;
  - BAST Hibah Nomor : W2-TUN5/479/PL.03/VI/2022 tanggal 26 Juni 2022;
  - Register DJPB Kaltim Nomor : 297NJRJA
  - Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL-BJS) Nomor: W2-TUN5/777/PL.03/XI/2022 tanggal 20 Oktober 2022;
  - Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS) Nomor : 1010167280 tanggal 25 November 2022.
- c. Hibah Masuk dari Pemerintah Kota Samarinda Berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp.719.100.000,-,. Peralatan dan Mesin berupa Kendaraan Dinas guna terlaksananya program/kegiatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, adapun rincian sebagai berikut:

No	Kendaraan	Tanggal Perolehan	Keterangan	Jumlah	Nilai Perolehan
1	Sedan	29/12/2020	Toyota Corolla Altis (2013)	1	Rp 343.950.000
2	Sedan	29/12/2020	Honda City (2004)	1	Rp 245.150.000
3	Station Wagon	29/12/2020	Toyota Kijang Standart (2002)	1	Rp 130.000.000
<b>Total</b>				<b>3</b>	<b>Rp 719.100.000</b>

Hibah tersebut diatas dicatat berdasarkan:

- Perjanjian Hibah Nomor : 030/1141/300.2 dan W2-TUN5/596/PL.06/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022;
- BAST Hibah Nomor : 030/1161/300.2 tanggal 13 Agustus 2022
- Register DJPB Kaltim Nomor : 2PPQEUCA

- Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL-BJS) Nomor: W2-TUN5/794/PL.06/XI/2022 tanggal 27 November 2022;
- Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS) Nomor : 1017378257 tanggal 29 Desember 2022.

Pada Tahun 2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda melakukan pembelian Aset di bawah Kapitalisasi, adapun rincian sebagai berikut:

No	BMN	Tanggal Perolehan	Jumlah	Harga Satuan	Nilai Perolehan
1	Tangga Alumunium	04/09/2020	1	Rp 670.000	Rp 670.000
2	Lemari Kayu	01/12/2020	6	Rp 975.000	Rp 5.850.000
3	Printer	01/12/2020	4	Rp 933.000	Rp 3.732.000
4	UPS	04/02/2020	4	Rp 893.000	Rp 3.572.000
5	Wireless Access Point	23/12/2020	1	Rp 690.000	Rp 690.000
<b>Total</b>					<b>Rp 14.514.000</b>

- a. Tangga Alumunium berdasarkan BAST Nomor : W2.TUN5/632A/PL.05/IX/2022 tanggal 4 September 2022;
- b. Lemari Kayu berdasarkan BAST Nomor W2-TUN5/803/PL.05/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022;
- c. Printer berdasarkan BAST Nomor W2-TUN5/832/PL.04/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022;
- d. Uninterruptible Power Suply (UPS) berdasarkan BAST Nomor W2-TUN5/835/PL.04/XII/2022 tanggal 4 Desember 2022;
- e. Wireless Access Point berdasarkan BAST Nomor : W2-TUN5/905/PL.04/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022.

*Gedung dan  
Bangunan  
Rp7.889.623.000,-*

### C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp7.889.623.000,-.

Tidak Terdapat Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan.

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019</b>	<b>7.889.623.000</b>
Mutasi tambah:	
Penilaian Revaluasi Aset Gedung dan Bangunan	0
Mutasi kurang:	
Penilaian Revaluasi Aset Gedung dan Bangunan	0
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>7.889.623.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	-477.371.474
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2020</b>	<b>7.412.251.526</b>

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Jalan, Jaringan dan  
Irigasi  
Rp192.064.950,-*

### C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tidak terdapat perubahan Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp192.064.950,-.

Tidak terdapat Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019</b>	<b>192.064.950</b>
Mutasi tambah:	
- Penambahan Nilai Jaringan	0
Mutasi kurang:	
-	0
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>192.064.950</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	-14.404.872
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2020</b>	<b>177.660.078</b>

*Aset Tetap Lainnya  
Rp5.527.078,-*

### C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sama sebesar Rp5.527.078,-.

Aset Tetap Lainnya tersebut berupa buku lainnya. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2022, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019</b>	<b>5.527.078</b>
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>5.527.078</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	0
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2020</b>	<b>5.527.078</b>

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Tidak terdapat  
Konstruksi Dalam  
Pengerjaan*

### **C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Tidak terdapat Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

*Akumulasi Penyusutan  
Aset Tetap  
Rp3.428.945.087,-*

### **C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp2.981.941.808,- dan Rp2.981.941.808,-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap*

TA 2022

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	3.676.660.851	2.745.381.993	931.278.858
2	Gedung dan Bangunan	7.889.623.000	664.356.598	7.225.266.402
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	192.064.950	19.206.496	172.858.454
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>11.758.348.801</b>	<b>3.428.945.087</b>	<b>8.329.403.714</b>

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tak Berwujud*  
*Rp98.890.000,-*

### C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp98.890.000,-.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berupa *software Komputer* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019</b>	<b>98.890.000</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>98.890.000</b>
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2020	(98.890.000)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2020</b>	<b>-</b>

Tidak terdapat transaksi mutasi tambah dan kurang.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Aset Tak berwujud TA 2022*

Uraian	Nilai Perolehan
Software Komputer	98.890.000
<b>Jumlah</b>	<b>98.890.000</b>

### C.22 Aset Lain-Lain

*Tidak Terdapat Aset Lain-Lain*

Tidak terdapat Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

*Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp98.890.000,-*

### C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp98.890.000,- dan tidak terdapat Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya pada 31 Desember 2021. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya*

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software Komputer	98.890.000	98.890.000	0
<b>Jumlah</b>	<b>98.890.000</b>	<b>98.890.000</b>	<b>0</b>
Aset Lain-lain	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>98.890.000</b>	<b>98.890.000</b>	<b>0</b>



Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Tidak terdapat Saldo*

#### **C.24 Uang Muka dari KPPN**

*Uang Muka dari KPPN*

Tidak terdapat saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Pada TA 2022 Bendahara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mengelola Uang Persediaan sebesar Rp50.000.000,- yang terbagi menjadi 2 yaitu UP Tunai sebesar Rp30.000.000,- dan UP Kartu Kredit Pemerintah sebesar Rp20.000.000,-. UP Tunai telah disetor ke Kas Negara pada tanggal 29 Desember 2022 dengan NTPN nomor 75F6D0NGUVTEKVR6 sebesar Rp13.809.204,-.

Pada Bulan Desember TA 2022 Bendahara Pengeluaran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda meminta TUP sebesar Rp33.902.000,- yang digunakan untuk pembayaran uang makan bulan Desember 2022 dan Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin. Terdapat sisa TUP dan telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 29 Desember 2022 dengan NTPN Nomor BC44A0N9UVTEL050 sebesar Rp637.100,-.

*Utang kepada Pihak*

#### **C.25 Utang kepada Pihak Ketiga**

*Ketiga*

*Rp27.920.589,-*

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp27.920.589,- dan Rp26.185.342,- . Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

### Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Beban Langganan Listrik	11.525.589	Tagihan Listrik Desember 2020
Beban Langganan Telepon	35.815	Tagihan Telepon Desember 2020
Beban Langganan Air	478.624	Tagihan Air Desember 2020
Beban Langganan Internet	15.725.561	Tagihan Internet Desember 2020
Beban Langganan Koran	155.000	Tagihan Koran Desember 2020
<b>Total</b>	<b>27.920.589</b>	

Tidak terdapat Saldo Pendapatan Diterima di Muka

### C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Tidak terdapat Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp27.920.589,-

### C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp27.920.589,- dan Rp26.185.342,- .

Beban yang Masih Harus Di Bayar merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

#### Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TH 2020	TH 2019
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	27.920.589	26.185.342
<b>Jumlah</b>	<b>27.920.589</b>	<b>26.185.342</b>

Ekuitas Rp25.106.440.923,-

### C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-

masing sebesar Rp25.106.440.923,- dan Rp24.797.526.601,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Pendapatan PNPB*

*Rp9.134.000,-*

## **D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

### **D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp9.134.000,- dan Rp7.655.000,.  
Pendapatan tersebut terdiri dari:

#### *Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2022 dan TA 2021*

URAIAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	9.134.000	7.655.000	19
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>9.134.000</b>	<b>7.655.000</b>	<b>19</b>

Pendapatan Negara Bukan Pajak Pada Tahun Anggaran 2022 berupa Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan adalah pendapatan yang diperoleh dari sewa rumah dinas.

### **D.2 Beban Pegawai**

*Beban Pegawai*

*Rp3.282.863.327,-*

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.282.863.327,- dan Rp3.466.053.265,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2022 dan TA 2021

URAIAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	Rp 1.124.137.020	Rp 1.185.450.020	-Rp 5,17
Beban Pembulatan Gaji PNS	Rp 15.957	Rp 16.355	-Rp 2,43
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	Rp 84.211.098	Rp 85.768.210	-Rp 1,82
Beban Tunj. Anak PNS	Rp 29.022.202	Rp 30.169.916	-Rp 3,80
Beban Tunj. Struktural PNS	Rp 36.540.000	Rp 38.160.000	-Rp 4,25
Beban Tunj. Fungsional PNS	Rp 1.453.800.000	Rp 1.542.275.000	-Rp 5,74
Beban Tunj. PPh PNS	Rp 194.906.008	Rp 207.345.504	-Rp 6,00
Beban Tunj. Beras PNS	Rp 57.863.580	Rp 60.398.280	-Rp 4,20
Beban Uang Makan PNS	Rp 185.888.000	Rp 191.080.000	-Rp 2,72
Beban Tunj. Umum PNS	Rp 11.285.000	Rp 11.100.000	Rp 1,67
Beban Tunj. Kemahalan Hakim	Rp 105.300.000	Rp 113.400.000	-Rp 7,14
<b>Jumlah</b>	<b>3.282.968.865</b>	<b>3.465.163.285</b>	<b>-Rp 5,26</b>

### D.3 Beban Persediaan

*Beban Persediaan*  
*Rp56.332.398,-*

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp56.332.398,- dan Rp57.233.431,- . Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2022 dan 2021

URAIAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	56.332.398	57.233.431	-1,57
<b>Jumlah</b>	<b>56.332.398</b>	<b>57.233.431</b>	<b>-1,57</b>

*Beban Barang dan Jasa*  
*Rp884.954.276,-*

#### **D.4 Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp884.954.276,- dan Rp683.840.424,- . Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

##### *Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2022 dan 2021*

<b>URAIAN JENIS BEBAN</b>	<b>TH 2020</b>	<b>TH 2019</b>	<b>NAIK (TURUN) %</b>
Beban Barang Operasional	714.530.220	537.806.097	32,86
Beban Langganan Daya dan Jasa	140.443.455	146.034.327	(3,83)
Beban Barang Operasional Pandemi COVID-19	4.241.601	0	100,00
Beban Jasa Pandemi COVID 19	10.395.000	0	100,00
Beban Barang Operasional Lainnya	15.344.000	15.344.000	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>884.954.276</b>	<b>683.840.424</b>	<b>29,41</b>

*Beban Pemeliharaan*  
*Rp316.354.857,-*

#### **D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp316.354.857,- dan Rp248.074.423,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Peningkatan Beban Pemeliharaan terjadi karena banyaknya peralatan dan mesin yang dimiliki telah mencapai batas masa manfaat sehingga memerlukan pemeliharaan yang lebih intensif dan adanya kenaikan harga pasar pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan TA 2022 dan 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	115.058.492	94.487.268	21,77
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	144.416.865	133.996.378	7,78
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan COVID-19	3.365.000	0	0,00
Beban Persediaan untuk pemeliharaan	115.000		
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	53.399.500	19.590.777	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>316.354.857</b>	<b>248.074.423</b>	<b>27,52</b>

*Beban Perjalanan Dinas*

*Rp19.569.202,-*

**D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp19.569.202,- dan Rp77.132.660,- . Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2022 dan 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	19.009.202	73.212.660	-74,04
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	560.000	3.920.000	-85,71
<b>Jumlah</b>	<b>19.569.202</b>	<b>77.132.660</b>	<b>-74,63</b>

*Tidak terdapat Beban*

*Barang untuk*

*Diserahkan kepada*

*Masyarakat*

**D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Tidak terdapat Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2022 dan 2021.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang

bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

*Tidak terdapat Beban  
Bantuan Sosial*

#### **D.8 Beban Bantuan Sosial**

Tidak terdapat Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 dan 2021. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

*Beban Penyusutan dan  
Amortisasi  
Rp447.003.279,-*

#### **D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp447.003.279,- dan Rp441.301.040,-.

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
TA 2022 dan 2021*

<b>URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	<b>TH 2020</b>	<b>TH 2019</b>	<b>NAIK (TURUN) %</b>
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	255.216.531	247.037.126	3,31
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	186.985.124	189.462.290	-1,31
Beban Penyusutan Jaringan	4.801.624	4.801.624	0,00
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>447.003.279</b>	<b>441.301.040</b>	<b>1,29</b>
Beban Amortisasi Software	-	-	0,00
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>447.003.279</b>	<b>441.301.040</b>	<b>1,29</b>



Tidak terdapat Beban  
Penyisihan Piutang Tak  
Tertagih

#### D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Tidak terdapat Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2022 dan 2021.

Surplus dari Kegiatan  
Non Operasional  
Rp360.864,-

#### D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

##### Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2022 dan 2021

URAIAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0,00
Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya	1.363.620	503.480	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	0	0	0,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-1.002.756	-545.217	83,92
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>360.864</b>	<b>-41.737</b>	<b>(964,61)</b>

\*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

Tidak terdapat Pos Luar  
Biasa

#### D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat Nilai untuk Pos Luar Biasa untuk Tahun 2022 dan 2021.

## **E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

### *Ekuitas Awal*

*Rp24.797.526.601,-*

### **E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp24.797.526.601,- dan Rp24.668.377.793,-.

### *Defisit LO*

*Rp(4.997.582.475,-)*

### **E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp(4.997.582.475,-) dan Rp(4.966.021.980,-) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### *Tidak terdapat*

*Penyesuaian Nilai Aset*

### **E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset**

Tidak terdapat Saldo Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk 31 Desember 2021. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

### *Tidak terdapat Koreksi*

*Nilai Persediaan*

### **E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Tidak terdapat Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2022 dan 2021.

### *Tidak terdapat Selisih*

*Revaluasi Aset Tetap*

### **E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Tidak Terdapat Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022,- sedangkan pada 31 Desember 2021 terdapat selisih reval sebesar Rp408.499.000,- .

### *Tidak terdapat Koreksi*

*Aset Tetap Non*

### **E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

Tidak terdapat Nilai Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022, sedangkan pada 31 Desember 2021

Revaluasi

terdapat selisih reval sebesar Rp(19.539.765,-).

Tidak terdapat Koreksi  
Lain-Lain

### E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Tidak terdapat Nilai Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan pada 31 Desember 2021.

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar Entitas  
Rp5.306.496.797,-

### E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp5.306.496.797,- dan Rp4.706.211.553,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

#### Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(9.369.000)
Ditagihkan ke Entitas Lain	4.581.765.797
Hibah Langsung	734.100.000
<b>Jumlah</b>	<b>5.306.496.797</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

#### E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DDEL sebesar Rp9.369.000.000,- sedangkan DKEL sebesar Rp4.581.765.797,-.

*Ekuitas Akhir*

*Rp25.106.440.923,-*

#### **E.5 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp25.106.440.923,- dan Rp24.797.526.601,-.

Tidak terdapat Transaksi antar entitas yang berkaitan dengan pencegahan penyebaran COVID -19.

## **F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.**

### **F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

Tidak Terdapat Kejadian – kejadian penting setelah tanggal neraca.

### **F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

Saat ini, Indonesia dan seluruh negara di dunia sedang menghadapi tantangan besar untuk memulihkan perekonomian yang terdampak pandemi *Coronavirus Disease 2021 (Covid-19)*.

Dalam situasi darurat khususnya terkait dengan pandemi Covid-19, terdapat banyak transaksi Pemerintah yang pelaksanaannya memerlukan penanganan sangat cepat, mendesak, dan masif. Hal ini tentunya harus diikuti penguatan tata kelola yang baik. Prinsip kehati-hatian, akuntabilitas dan transparansi mutlak tetap harus dijaga, sehingga setiap transaksi keuangan negara dapat dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Dengan demikian, capaian opini atau kualitas laporan keuangan dapat dipertahankan dan terus dapat ditingkatkan.

#### **F.2.1 Temuan dan Tindak Lanjut BPK**

Tidak terdapat temuan dan tindak lanjut temuan BPK

#### **F.2.2 Rekening Pemerintah**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mengelola 3 Rekening Pemerintah. Berikut Rincian Rekening Pemerintah yang dikelola Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

1. Rekening Giro atas nama *BPG 046 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda*, Nomor Rekening 0082-01-000112-30-0, digunakan untuk menampung Anggaran DIPA 005.01. Rekening telah mendapatkan persetujuan dari KPPN Samarinda Nomor S-0650/WPB.020/KP.046/2015 tanggal 09 Maret 2015.

2. Rekening Giro atas nama *BPG 046 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda*, Nomor Rekening 0082-01-003052-30-5, digunakan untuk menampung Anggaran DIPA 005.05. Rekening telah mendapatkan persetujuan dari KPPN Samarinda Nomor S-0897/WPB.020/KP.046/2015 tanggal 13 April 2015.
3. Rekening Giro atas nama *RPL 046 PTUN Samarinda utk Biaya Perkara*, Nomor Rekening 2069-01-000153-30-2, digunakan untuk menampung Dana Titipan Pihak ke tiga. Rekening telah mendapatkan persetujuan dari BUN Pusat Nomor S-2783/MK.5/2015 tanggal 27 April 2015.

### **F.2.3 Revisi DIPA**

Revisi Anggaran pada tahun 2022 ini berbeda dengan tahun – tahun sebelumnya karena terdapat beberapa kebijakan dan regulasi khusus terkait penanganan pandemic COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN). Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda melakukan revisi anggaran dalam rangka melakukan pencegahan penyebaran COVID – 19 dengan merevisi belanja Perjalanan Dinas dan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan.

Terdapat 3 kali revisi dipa pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yaitu Revisi DIPA dan POK . Adapun rinciannya adalah :

1. Revisi DIPA Pertama adalah Revisi POK . POK yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional perkantoran. Revisi yang dilakukan adalah perubahan volume pemeliharaan kendaraan dinas roda 4. Revisi dilakukan berdasarkan rapat yang dilaksanakan pada 25 Februari 2022. Penambahan Volume Kendaran Dinas Roda 4 semula 4 unit menjadi 5 unit, dan penambahan anggaran untuk belanja keperluan perkantoran sebesar Rp332.000,-.
2. Revisi DIPA Kedua adalah Revisi POK. Revisi yang dilakukan adalah POK yang dilkukan untuk pemenuhan belanja COVID-19, Pengadaan inventaris kantor dibawah kapitalisasi, dan lain-lain. Revisi dilakukan berdasarkan rapat anggaran tanggal 4 September 2022. Penambahan belanja COVID – 19 diambil dari Pengurangan transport rakernas dan perjadiin.

3. Revisi DIPA Ketiga adalah Revisi DIPA yang dilakukan untuk pengesahan POK sebelumnya dan penyelesaian Pagu Minus TA 2022. Revisi dilakukan berdasarkan surat revisi nomor: W2-TUN5/797/OT.01.1/XI/2022 tanggal 30 November 2022, dan telah mendapatkan pengesahan Kanwil DJPB Kaltim Nomor : S-1298/WPB.20/2022 tsnggsi 8 Desember 2022.

#### **F.2.4 Ralat SPM, SSBP, dan SSPB**

Sepanjang Tahun Anggaran 2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak melakukan perbaikan/ Ralat SPM.

#### **F.2.5 Catatan Penting Lainnya**

Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan No. 65/PA/SK/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Pejabat Pengelola Keuangan (DIPA) sesuai dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: W2-TUN5/002/KU.01/I/2022 tanggal 2 Januari 2022 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, PPABP, Staff Pengelola Keuangan SK Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: W2-TUN5/001/KU.01/I/2022 tanggal 2 Januari 2022 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima, SK Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: W2.TUN5/001/KU.01/2022 tanggal 2 Januari 2022 tentang Pengelola Sakpa/SAI.

Adapun Nama-nama dalam SK tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Satker	Jabatan	Nama
<b>Pengadilan</b>	Kuasa Pengguna Anggaran	Epi Randabunga Rungngu, S.E.
	Pejabat Pembuat Komitmen	Rahmat Hidayat, S.T.
<b>Tata</b>	Pejabat Penanda Tangan/Penguji	Epi Randabunga Rungngu, S.E
<b>Usaha Negara</b>	SPM	
<b>Samarinda</b>	Bendahara Pengeluaran	Muji Rahayu Mustikaningtiyas
	Bendahara Penerima	Tuparni
	Operator SAI (SAIBA)	Mardiana
	Operator SAI (SIMAK)	Rahmat Hidayat, S.T.

Pada bulan Juli 2022 terdapat perubahan pejabat perbendaharaan pada satker Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Perubahan terjadi karena Pejabat Penguji dan penandatanganan Surat perintah membayar memasuki masa purnabakti, sehingga belum terdapat pengganti pejabat PPSPM yang baru, dan PPSPM di rangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran, berdasarkan SK Nomor: W2.TUN5/476/KU/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Staf Pengelola Keuangan, dan Pengelola Belanja Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Adapun perubahannya adalah sebagai berikut:

Satker	Jabatan	Nama
<b>Pengadilan</b>	Kuasa Pengguna Anggaran	Epi Randabunga Rungngu, S.E.
	Pejabat Pembuat Komitmen	Rahmat Hidayat, S.T.
<b>Tata</b>	Pejabat Penanda Tangan/Penguji	Epi Randabunga Rungngu, S.E
<b>Usaha Negara</b>	SPM	
<b>Samarinda</b>	Bendahara Pengeluaran	Muji Rahayu Mustikaningtiyas
	Bendahara Penerima	Tuparni
	Operator SAI (SAIBA)	Mardiana
	Operator SAI (SIMAK)	Rahmat Hidayat, S.T.



**KANTOR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**  
**Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan,**  
**Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap**  
**Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2022**

No	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny.	Nilai Buku
		Manfaat		Per 31-12-2019	Tahun 2020	Per 31-12-2020	Per 31-12-2020
<b>A</b>	<b>Tanah</b>						
1	Tanah	-	0	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>						
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	1.150.449.441	416.244.763	66.468.963	482.713.726	<b>667.735.715</b>
2	Alat Kantor	5	457.331.525	423.277.525	23.164.000	446.441.525	<b>10.890.000</b>
3	Alat Rumah Tangga	5	1.134.581.895	991.212.175	69.024.720	1.060.236.895	<b>74.345.000</b>
4	Alat Komunikasi	5	6.770.000	6.770.000	-	6.770.000	-
5	Komputer Unit	4	643.536.300	461.028.125	68.381.800	529.409.925	<b>114.126.375</b>
6	Peralatan Komputer	4	249.439.690	163.922.674	26.656.648	190.579.322	<b>58.860.368</b>
7	Alat Bengkel tak Bermesin	5	0	-	-	-	-
8	Peralatan Pemancar	4	21.950.000	21.950.000	-	21.950.000	-
9	Alat Studio	5	12.602.000	5.760.200	1.520.400	7.280.600	<b>5.321.400</b>
	<b>Jumlah</b>		<b>3.676.660.851</b>	<b>2.490.165.462</b>	<b>255.216.531</b>	<b>2.745.381.993</b>	<b>931.278.858</b>
<b>C</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	6.249.518.000	345.365.311	135.198.838	480.564.149	<b>5.768.953.851</b>
2	Bangunan Gedung Tempat Tingga	50	1.319.970.000	114.048.318	44.995.788	159.044.106	<b>1.160.925.894</b>
3	Tugu/Tanda Batas	50	320.135.000	17.957.845	6.790.498	24.748.343	<b>295.386.657</b>
	<b>Jumlah</b>		<b>7.889.623.000</b>	<b>477.371.474</b>	<b>186.985.124</b>	<b>664.356.598</b>	<b>7.225.266.402</b>
<b>D</b>	<b>JARINGAN</b>						
1	JARINGAN LISTRIK	50	192.064.950	14.404.872	4.801.624	19.206.496	<b>172.858.454</b>
	<b>Jumlah</b>		<b>192.064.950</b>	<b>14.404.872</b>	<b>4.801.624</b>	<b>19.206.496</b>	<b>172.858.454</b>
<b>Total</b>			<b>11.758.348.801</b>	<b>2.981.941.808</b>	<b>447.003.279</b>	<b>3.428.945.087</b>	<b>8.329.403.714</b>

\*Beban Amortisasi

Lampiran II: Daftar Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA  
 DAFTAR HIBAH LANGSUNG BERUPA UANG/BARANG/JASA  
 PER 31 DESEMBER 2020

No	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Ket.
1	-	-	-	-	-	-	-
2							
3							
<b>Jumlah</b>				Rp	-	Rp	-